



IMPLEMENTASI PROGRAM SATU MILIAR SATU DESA DALAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DI DESA TONJONG KECAMATAN TAJUR HALANG KABUPATEN BOGOR

Raissa Azalia Pahlevi¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Fenomena masalah implementasi Program Satu Miliar Satu Desa di Desa Tonjong belum berjalan optimal. Rumusan masalah bagaimana implementasi program satu miliar satu desa dalam pengembangan pembangunan di Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa dalam Pengembangan Pembangunan di Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor. Teori yang digunakan Implementasi Program oleh David C. Korten dengan 3 dimensi yaitu Program itu sendiri, Pelaksanaan program, dan Kelompok sasaran. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan Kepala Desa Tonjong, Sekretaris Desa Tonjong, KAUR Perencanaan, KAUR Keuangan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tonjong, Ketua RT, Ketua RW, dan 2 Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) menunjukkan dinamika yang kompleks. Dari sisi perencanaan, program telah tepat sasaran; dari sisi pelaksanaan, masih terdapat kelemahan serius dalam akuntabilitas dan kapasitas kelembagaan; sementara dari sisi kelompok sasaran, partisipasi masyarakat sangat tinggi, meski kepercayaan publik sempat menurun akibat penyimpangan pada tahun 2022. Dengan demikian, implementasi program ini dapat dikategorikan belum optimal, karena hanya sebagian dari tujuan kebijakan yang berhasil tercapai.

Kata kunci: Implementasi Program, SAMISADE, Pembangunan Desa.

Abstract

The problem is that the implementation of the One Billion One Village Programme in Tonjong Village has not been optimal. The problem formulation is how the One Billion One Village Programme is implemented in development in Tonjong Village, Tajur Halang Subdistrict, Bogor Regency. The purpose of this research is to describe and analyse the implementation of the One Billion One Village Programme in the development of Tonjong Village, Tajur Halang District, Bogor Regency. The theory used is David C. Korten's three dimensions of programme implementation, namely the programme itself, programme implementation, and target groups. The research method is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Informants included the Head of Tonjong Village, the Secretary of Tonjong Village, the Head of Planning, the Head of Finance, the Chair of the Tonjong Village Consultative Body (BPD), the Head of the Neighbourhood Association (RT), the Head of the Community Association (RW), and two community members. The results of this study indicate that the implementation of the One Billion for One Village Programme (SAMISADE) shows complex dynamics. In terms of planning, the programme has been on target; in terms of implementation, there are still serious weaknesses in accountability and institutional capacity; while in terms of the target group, community participation is very high, although public trust declined due to irregularities in 2022. Thus, the implementation of this programme can be categorised as suboptimal, as only some of the policy objectives have been achieved.

Keywords: Program Implementation, SAMISADE, Village Development

PENDAHULUAN

Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) di Desa Tonjong tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan dari Program Satu Miliar Satu Desa. Pembangunan di Desa Tonjong terhambat dikarenakan Desa Tonjong tidak melaksanakan kegiatan dan belum melaporkan penggunaan anggaran dari Bantuan Keuangan desa hingga waktu yang sudah ditentukan (Bogor-Kita 2023a).

Masyarakat Desa Tonjong merasa dirugikan karena jalan diwilayahnya tidak kunjung selesai dibangun. Bahkan pihak BPD Tonjong sebagai pengawas kinerja Kepala Desa dan Pemdес juga sudah memberikan teguran sampai ketiga. Selain itu, setiap kali pemanggilan Kepala Desa selalu ingkar dan meminta waktu. Camat dari Kecamatan Tajur Halang

pun menegaskan dari total 7 Desa yang ada di Kecamatan Tajur Halang, hanya Desa Tonjong yang bermasalah, sedangkan 6 Desa lainnya telah menyelesaikan giat pembangunan SAMISADE secara baik. Informasi terakhir didapatkan bahwa Desa Tonjong untuk sementara waktu tidak mendapatkan lagi anggaran dari Program Satu Miliar Satu Desa dan berakhir mendapatkan anggaran pada tahun 2022 saat tahap 2 realisasi program (Kalila and Rahmawati 2024).

Fenomena utama yang terjadi dalam pelaksanaan Program Satu Miliar Satu Desa di Desa Tonjong adalah kegagalan implementasi program, sehingga pembangunan infrastruktur seperti jalan tidak selesai, dana tahap dua sebesar Rp 336 Juta sudah dicairkan dan digunakan tanpa hasil yang terlihat. Desa Tonjong tidak melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan (Bogor-Kita 2023b), tidak melaporkan penggunaan anggaran secara tepat waktu, serta terus-menerus mendapatkan teguran berupa surat teguran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengawasan Camat Kecamatan Tajur Halang. Akibatnya, masyarakat merasa dirugikan karena manfaat dan tujuan dari program tidak tercapai dan Desa Tonjong menjadi satu-satunya desa yang mengalami masalah di Kecamatan Tajur Halang. Karena itu, aliran anggaran program dihentikan sejak 2022. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam pengelolaan dana desa, pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, serta kurangnya akuntabilitas dari Pemerintah Desa.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul “Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa Dalam Pengembangan Pembangunan di Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor.”

Model Implementasi Program menurut David C. Korten harus mencakup tiga elemen yang disebutkan dalam model kesesuaian melalui pendekatan proses pembelajaran. Korten memusatkan model ini pada tiga elemen kesesuaian, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok

sasaran. Menurut Korten, suatu program akan dapat berjalan dengan baik jika terdapat kesesuaian di antara tiga elemen tersebut. Dengan menggunakan teori Korten, penelitian ini dapat menjelaskan kegagalan implementasi program Satu Miliar Satu Desa dari perspektif kesesuaian sistemik. Program tidak dapat berjalan optimal karena tidak selaras dengan kemampuan lembaga pelaksana (pemerintah desa) dan kebutuhan masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk melakukan sebuah penelitian terkait dengan Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa dalam Pengembangan Pembangunan di Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor. Berdasarkan metode yang digunakan, peneliti berusaha memberikan suatu gambaran, menjelaskan, dan mengidentifikasi dimensi yang terdapat pada Implementasi Program, sehingga peneliti dapat menyimpulkan mengenai Implementasi Program Satu Miliar Satu Desa dalam Pengembangan Pembangunan di Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor.

PEMBAHASAN

Selama proses observasi yang dilakukan peneliti di Desa Tonjong pada Desember 2025, peneliti menemukan bahwa sebagian besar titik pembangunan jalan hasil program SAMISADE tahap pertama telah selesai dengan kondisi cukup baik, meskipun di beberapa titik terlihat mulai mengalami keretakan ringan. Namun, di area yang seharusnya menjadi lokasi pembangunan tahap kedua, peneliti masih menemukan jalan berbatu dan berlumpur tanpa perkerasan.

Peneliti juga mengamati bahwa di beberapa lokasi masih terdapat tumpukan material seperti batu kali dan pasir yang tidak digunakan, menandakan bahwa kegiatan pembangunan sempat terhenti di tengah proses. Beberapa perangkat desa juga terlihat melakukan perbaikan kecil secara mandiri bersama masyarakat

sekitar, meskipun tidak dalam skala besar seperti yang direncanakan.

Dari hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun program SAMISADE secara umum dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pelaksanaannya belum mampu mencapai hasil yang diharapkan karena adanya hambatan administratif dan lemahnya pengawasan keuangan. Program yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan desa justru terhambat oleh permasalahan internal pengelolaan dana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara *program itu sendiri* dengan kebutuhan masyarakat di Desa Tonjong bersifat parsial. Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan awal, program berhasil menjawab kebutuhan masyarakat akan infrastruktur jalan yang memadai. Akan tetapi, pada tahap berikutnya, ketidaksesuaian muncul akibat lemahnya tata kelola dan pertanggungjawaban, sehingga tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya tercapai.

Secara umum, pelaksanaan program SAMISADE di Desa Tonjong menunjukkan dua sisi yang kontras. Di satu sisi, tahap pertama berjalan efektif dan membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memperbaiki infrastruktur jalan. Namun di sisi lain, tahap kedua justru gagal dilaksanakan karena lemahnya sistem pertanggungjawaban dan kontrol internal.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan tahap pertama menggambarkan bahwa ketika ada koordinasi yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan DPMD, program mampu berjalan sesuai tujuan. Tetapi ketika pengawasan melemah dan tanggung jawab tidak dijalankan secara disiplin, maka keberlanjutan program menjadi terhenti.

Kegagalan pada tahap kedua tidak hanya berdampak pada aspek fisik pembangunan, tetapi juga menurunkan kredibilitas pemerintah desa di mata masyarakat dan pemerintah daerah. Desa Tonjong kemudian tidak lagi menerima alokasi dana SAMISADE pada tahun berikutnya karena belum menyelesaikan

kewajiban pelaporan keuangan tahap sebelumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program pembangunan desa tidak hanya diukur dari penyelesaian fisik proyek, tetapi juga dari bagaimana hubungan sosial antara pemerintah dan masyarakat terjaga dengan baik. Dalam kasus SAMISADE di Desa Tonjong, kegagalan tahap kedua menjadi bukti bahwa aspek sosial seperti kepercayaan, komunikasi, dan partisipasi tidak kalah penting dari aspek administratif. Masyarakat Desa Tonjong sebenarnya telah menunjukkan bentuk partisipasi yang tinggi pada tahap awal, baik melalui keikutsertaan dalam musyawarah desa maupun kegiatan padat karya. Akan tetapi, absennya komunikasi yang terbuka dan transparan setelah terjadi permasalahan menyebabkan partisipasi itu menurun drastis.

Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat memerlukan pendekatan partisipatif yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap pelaksanaan, tetapi harus terus berlanjut dalam tahap evaluasi dan pengawasan agar rasa memiliki terhadap program tetap terjaga.

KESIMPULAN

Program Satu Miliar Satu Desa secara konseptual telah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa Tonjong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan desa yang menjadi sarana vital bagi aktivitas sosial dan ekonomi. Pemerintah Desa Tonjong telah melakukan proses identifikasi kebutuhan melalui mekanisme partisipatif seperti musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).

Dimensi kedua dari teori Korten menunjukkan bahwa pelaksanaan program di Desa Tonjong memiliki dua fase yang berbeda: tahap pertama berjalan dengan baik, sementara tahap kedua mengalami kegagalan total. Pada tahap pertama, pelaksanaan kegiatan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik

berkat koordinasi antara perangkat desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan masyarakat. Namun, pada tahap kedua tahun 2022, implementasi tidak berjalan karena dana yang telah dicairkan tidak digunakan sesuai ketentuan.

Dimensi ketiga menyoroti hubungan antara pemerintah desa sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima manfaat program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tonjong memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan program. Mereka terlibat aktif dalam musyawarah desa, menjadi bagian dari tim pelaksana kegiatan (TPK), serta ikut melakukan pengawasan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, S., & Sumantri, L. (2016). *ADMINISTRASI PEMBANGUNAN: Teori dan Praktik*. Bandung: PUSTAKA SETIA Bandung.
- Creswell, J. W., Creswell, & David, J. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE.
- Dani, R., Agustini, Kasanah, U., Syamsul, E. M., Hadromi, Pujiriyani, D. W., . . . Aldi. (2025). *DESAIN PENELITIAN: Teori, Metode, Implementasi*. Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Igirisa, I. (2022). *KEBIJAKAN PUBLIK: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Jaya, I. M. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: QUADRANT.
- Jumroh, & Pratama, Y. J. (2021). *IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK: TEORI DAN PRAKTIK*. Solok: INSAN CENDEKIA MANDIRI.
- Korten, D. C. (1984). *People Centered Development: Contributions toward Theory and Planning Frameworks*. US: Kumarian Press.
- Shuida, N. (2016). *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta. Suaib. (2023). *Pembangunan dan Pemberdayaan*

Masyarakat. Indramayu:

Penerbit Adab.

Sudaryono. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Method*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA BANDUNG.

Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D*. Bandung: ALFABETA BANDUNG.

Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Tapi, T., Rumata, N. A., Hippy, I. K., R, S. A., Pratama, A. P., Anwarudin, O.,

. . . Hendris. (2024). *Pembangunan Desa*. Yayasan Kita Menulis .

Winarno, B. (2014). *KEBIJAKAN PUBLIK: TEORI, PROSES, STUDI KASUS*.

Yogyakarta: PT. BUKU SERU.

Jurnal

Abdurrahman, & Suriyana, E. (2022). Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan

Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *Japb*, 1-14.

Kalila, S. N., & Rahmawati, R. (2024). Dinamika Relasi Aktor dalam Mendorong Pembangunan Desa Melalui Kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 106-117.

Michel, D., Mutiarin, D., & Manaf, H. b. (2024). Evaluation of the Samisade (Satu Miliar Satu Desa) Program in Bogor Regency. *International Journal of Social Science and Businedd*.

Mintarsih, M., & Saefullah. (2023). Upaya pembangunan desa melalui program samisade di kabupaten bogor. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 52-60.

Pratama, R. E., & Maruapey, M. H. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM SATU MILIAR SATU DESA KABUPATEN BOGOR STUDI KASUS DI DESA MEGAMENDUNG. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 25- 36.

Sadu, F. A., Bumulo, F., Maruwae, A., Mahmud, M., & Damiti, F. (2025).

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Lompotoo Kecamatan SuwawaTengah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (JPP)*, 232-245.

Sinuraya, U. U., & Revida, E. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Tanjung Beringin Kabupaten Karo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 10472-10481.

Sulistyorini, S. (2022). Teori-Teori Implementasi dan Adopsinya dalam Pendidikan. *ResearchGate*, 89-105.

Supardi, A. (2025). Kemandirian Desa di Era UU No. 3 Tahun 2024: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Praktik. *Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)*, 385-395.

Skripsi

Hidayah, R. N. (2022). *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI*. Cimahi.

Widiastuti, M. V. (2020). *IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO DI KELURAHAN KARATON KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020*. Cimahi.

Website Resmi/Berita

Bogor-Kita. (2023, Mei 24). *Kepala Desa Tonjong dan Cidokom Harus Kembalikan Dana Samisade*. Retrieved from bogor-kita.com:

<https://bogor-kita.com/kepala-desa-tonjong-dan-cidokom-harus-kembalikan-dana-samisade/>

Bogor-Kita. (2023, Februari 22). *Samisade Di Desa Tonjong Rp336 Juta Cair, Tidak Ada Pembangunan, Kemana Uangnya?*

Retrieved from bogor-kita.com: <https://bogor-kita.com/samisade-di-desa-tonjong-rp336-juta-cair-tidak-ada-pembangunan-kemana-uangnya/>

pakuanraya. (2023, Februari 26). *SamiSade di Desa Tonjong Tak Berjalan Mulus, DPMD Ancam Lapo Inspektorat*.

Retrieved from pakuanraya.com: <https://pakuanraya.com/samisade-di-desa-tonjong-tak-berjalan-mulus-dpmd-ancam-lapor-inspektorat/>

Dokumen

Dokumen Profil Pemerintah Desa Tonjong 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Desa
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman
Bantuan Keuangan Infrastruktur.